

Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat

Putri Hafizatul Hasanah¹, Muhammad Anshari²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia.

*Korespondensi: putrihafizatulhasanah@gmail.com, muhammadanshari@unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

1 Juni 2026

Disetujui:

20 Juni 2026

Terbit daring:

24 Juli 2026

DOI: -

Sitasi:

Hasanah, P. H & Anshari, M. (2026). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat

Abstract:

This analysis evaluates how local government spending, categorized into personnel, goods and services, and capital expenditure, affects economic acceleration across West Sumatra Province, incorporating domestic investment as a controlling factor. Utilizing a panel dataset spanning 19 regencies and cities from 2019 to 2024, the study employs panel data regression via the Fixed Effect Model (FEM) framework. The empirical evidence demonstrates that public allocation for goods, services and capital outlays exert a positive and statistically meaningful impact on regional economic growth. Conversely, personnel spending and domestic investments exhibit positive but insignificant. On a simultaneous note, the joint interaction of all examined variables collectively stimulates economic expansion in the region. Consequently, local authorities within West Sumatra are strongly encouraged to prioritize and scale up budget distributions toward highly productive sectors, specifically targeting goods, services, and infrastructural capital developments.

Keywords: Local Government Expenditure, Economic Growth

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh belanja pemerintah daerah berdasarkan jenis belanja, mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan investasi dalam negeri sebagai variabel kontrol. Menggunakan basis data panel yang bersumber dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan regresi data panel melalui pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil yang diperoleh yaitu belanja barang dan jasa dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat, sedangkan belanja pegawai dan investasi dalam negeri berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Secara simultan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan investasi dalam negeri menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, penting adanya peningkatan alokasi anggaran untuk komponen belanja barang dan jasa dan belanja modal oleh pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

Kode Klasifikasi JEL: H72, O47, R11, C23

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) memberikan kewenangan kepada setiap provinsi serta kabupaten/kota untuk mengelola keuangan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah sehingga dapat mempercepat pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Badrudin, 2017)). Otonomi daerah juga diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan memastikan bahwa pembangunan merata di seluruh wilayah.

Sukirno (2016) menjelaskan bahwa ekonomi tumbuh seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, yang berdampak pada kenaikan produksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Kapasitas suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat biasanya mencerminkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Jumlah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari semua aktivitas ekonomi di daerah itu diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan keadaan ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. Dalam tabel 1 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat bersifat fluktuatif dari tahun 2019 sampai 2024. Disinilah peran otonomi daerah dapat diberlakukan, kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan serta mengambil kebijakan yang dapat berdampak pada kemajuan daerah mereka, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu indikator fiskal yang dapat mempengaruhi ekonomi lokal yaitu alokasi belanja daerah. Belanja daerah adalah pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah. (Fajriar et al., 2025) mengatakan semakin tepat pengalokasian belanja pemerintah daerah, maka sudah seharusnya diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 mengenai keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, belanja pegawai dibatasi maksimal 30% dari total APBD dan harus menetapkan belanja infrastruktur layanan public minimal 40% dari total APBD. Pada penelitian ini belanja daerah difokuskan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Belanja pegawai adalah pengeluaran untuk gaji, tunjangan serta fasilitas bagi aparatur sipil negara sebagai salah satu dukungan untuk kegiatan pemerintah. Selanjutnya belanja barang dan jasa yang mencerminkan pengeluaran untuk kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan belanja modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli dan membangun aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun meliputi tanah, peralatan mesin, jalan dan aset lainnya. Realisasi belanja pemerintah daerah Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat 20019-2024 (Miliar Rupiah)

Tahun	Belanja Pegawai	Proporsi	Belanja Barang Jasa	Proporsi	Belanja Modal	Proporsi	Total Belanja APBD	Laju PDRB
2019	11.261,37	41%	6.810,17	25%	5.232,86	19%	27.667,83	5,01%
2020	10.940,82	42%	5.700,15	22%	3.519,43	14%	25.857,65	-1,61%
2021	11.154,77	43%	7.096,87	27%	3.237,20	13%	25.844,84	3,29%
2022	10.964,26	42%	7.722,11	30%	3.842,58	15%	26.147,69	4,36%
2023	10.088,87	41%	7.320,06	30%	3.765,68	15%	24.723,60	4,62%
2024	12.791,23	46%	7.658,09	27%	3.068,90	11%	27.999,94	4,36%

Sumber: BPS Sumatera Barat

Data realisasi belanja daerah tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan alokasi belanja, dimana belanja pegawai mendominasi dan terus meningkat, sementara itu belanja modal yang merupakan pendorong utama pembangunan infrastruktur justru mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa belanja pegawai meningkat dari Rp11.261,37 miliar pada tahun 2019 menjadi 12.791,23 miliar pada tahun 2024. Proporsi belanja pegawai dalam belanja daerah berkisar dari 41 persen hingga 46 persen dari total belanja daerah. Belanja barang dan jasa juga meningkat dari Rp6.810,17 miliar tahun 2019 menjadi Rp7.685,09 miliar tahun 2024 dengan proporsi 22 persen hingga 30 persen dari total belanja daerah. Sementara itu, belanja modal mengalami penurunan dari Rp5.232,86 miliar tahun 2019 menjadi Rp3.068,90 miliar tahun 2024 dengan proporsi yang hanya 11 persen hingga 19 persen dari total belanja daerah.

Selama periode 2019 sampai 2024, perkembangan belanja daerah Sumatera Barat menunjukkan kecenderungan yang tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, total belanja daerah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin besarnya kapasitas fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, serta pembangunan daerah. Walaupun pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sudah menunjukkan pemulihan setelah pandemi, tetapi masih mengalami perlambatan pertumbuhan seperti pada tahun 2024. Padahal pada tahun tersebut realisasi total belanja daerah mencapai Rp27.999,94 miliar.

Apabila dilihat dari komposisi belanja daerah, proporsi belanja pegawai masih mendominasi total belanja daerah, sedangkan proporsi belanja modal yang secara teoritis lebih produktif justru terus mengalami penurunan. Belanja pegawai pada umumnya digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan dan kompensasi ASN lebih banyak mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara tidak langsung. Sebaliknya, belanja modal yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan asset tetap dan penyediaan sarana publik secara teoritis dapat meningkatkan kapasitas produksi daerah dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Namun, kondisi nyata menunjukkan bahwa peningkatan total belanja daerah belum diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat secara konsisten. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan apakah perlambatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat lebih disebabkan oleh kuantitas belanja produktif yang rendah atau komposisi alokasi belanja daerah yang belum optimal.

Secara teoritis, Keynesian menyatakan pengeluaran pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Namun, menurut teori pertumbuhan endogen Robert J. Barro (1990), pengeluaran pemerintah dapat memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi apabila difokuskan pada pengeluaran bersifat produktif dan mampu meningkatkan kapasitas produksi perekonomian. Oleh karena itu, perbedaan proporsi antar komponen belanja daerah menjadi penting untuk dikaji, karena setiap jenis belanja memiliki mekanisme yang berbeda dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan investasi dalam negeri sebagai variabel kontrol. Investasi yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk menanamkan modal dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa pada perekonomian. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan realisasi investasi dalam negeri Provinsi Sumatera Barat meningkat dari Rp3.026,64 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp8.809,09 miliar pada tahun 2024.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Waryanto (2017), menemukan bahwa belanja modal positif signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lainnya oleh Cesarina Maulid et al., (2021) menemukan bahwa belanja pegawai dan belanja barang dan jasa memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara itu belanja modal justru memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Ramadhan et al., (2023) juga menemukan bahwa belanja barang dan jasa berkontribusi positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja pegawai berkontribusi negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik memilih judul penelitian “Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat”

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen menekankan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam sistem perekonomian. Robert J. Barro (1990) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi akibat adanya kekuatan endogen yang berkaitan dengan kebijakan fiskal pajak dan pengeluaran pemerintah, yang bisa mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Peran pemerintah sebagai penyedia layanan publik memberikan kontribusi terhadap fungsi produksi, sehingga menciptakan hubungan yang menguntungkan antara pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

Robert J. Barro membedakan antara pengeluaran produktif yang masuk fungsi produksi dan pengeluaran konsumtif yang hanya memasuki fungsi utilitas. Pengeluaran konsumtif cenderung menghambat pertumbuhan karena menaikkan beban pajak tanpa memberikan manfaat produktivitas. Selain itu, Barro menunjukkan bahwa keputusan tabungan dan investasi swasta menghasilkan pertumbuhan lebih rendah dari tingkat sosial optimal karena adanya eksternalitas positif yang diabaikan produsen individu.

Model Barro menganggap belanja pemerintah sepenuhnya didanai oleh penerimaan pajak. Namun di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah tidak sepenuhnya didanai melalui penerimaan perpajakan. Di pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah didanai oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer ke daerah (Santika & Qibthiyah, 2020).

Teori Keynesian

Keynesian dalam Mankiw (2016) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh permintaan agregat yang terdiri dari pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan net ekspor. Peningkatan salah satu elemen tersebut akan mendorong peningkatan agregat dan produksi di masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui *multiplier effect*. Teori Keynes berkaitan dengan siklus perputaran pendapatan yang menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran atau konsumsi akan memperbesar pendapatan nasional dalam perekonomian yang sama. Apabila masyarakat menghindari belanja dan lebih memilih untuk menabung uangnya, hal ini akan berdampak pada kelangsungan siklus perputaran uang, sehingga perekonomian mengalami perlambatan. Sebaliknya, jika masyarakat meningkatkan pengeluaran maka perekonomian juga akan tumbuh.

Pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran pemerintah dirumuskan $Y = C + G + X - M$. Y merupakan pendapatan nasional, C menunjukkan konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah total ekspor dan M adalah total impor. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional dapat dilihat dari waktu ke waktu seberapa besar peran pengeluaran pemerintah dalam membentuk pendapatan nasional.

Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal yang dikembangkan oleh Oates tahun 1972 menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dilakukan agar pemerintah daerah lebih mampu memahami kebutuhan masyarakat lokal sehingga pelayanan publik bisa lebih efisien dan efektif. Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran yang diberikan pemerintah tingkat atas ke pemerintah di bawahnya guna mendukung fungsi atau tugas pemerintah yang dilimpahkan (Arniati, 2022)

Badrudin (2017) menyatakan bahwa dalam desentralisasi fiskal pemerintah daerah hendaknya menyajikan pelayanan publik yang memadai untuk seluruh masyarakat. Desentralisasi fiskal menawarkan berbagai keuntungan bagi manajemen sektor publik seperti meningkatkan pertumbuhan, memperkuat akuntabilitas dan responsive pemerintah terhadap tuntutan akan kebutuhan daerah (Ginting et al., 2019). Desentralisasi fiskal terbagi menjadi dua jenis yaitu: otonomi fiskal daerah dan peran fiskal pemerintah daerah. Otonomi fiskal berkaitan dengan transfer uang antar pemerintah daerah, pinjaman yang diberikan kepada daerah serta tanggung jawab daerah dalam menyediakan barang dan jasa publik. Sementara itu, peran fiskal pemerintah daerah berkaitan langsung dengan tanggung jawab daerah dalam mengelola pengeluaran yang terkait dengan total pengeluaran pemerintah (Puspita et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan asosiatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi variabel, sementara pendekatan asosiatif digunakan untuk menganalisis dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel dari 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat selama periode 2019 sampai 2024. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 2. Variabel Penelitian

Variabel	Jenis Variabel	Satuan	Sumber Data
PDRB	Dependen	Persen	BPS (Badan Pusat Statistik)
Belanja Pegawai (X1)	Independen	Miliar Rupiah	DJPK (Kementrian Keuangan)
Belanja Barang Jasa (X2)	Independen	Miliar Rupiah	DJPK (Kementrian Keuangan)
Belanja Modal (X3)	Independen	Miliar Rupiah	DJPK (Kementrian Keuangan)
Investasi (Z)	Kontrol	Juta Rupiah	BPS (Badan Pusat Statistik)

Pemilihan model dilakukan melalui uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier. Persamaan modal yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 \ln Z_4 + \varepsilon \quad (1)$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa Y adalah pertumbuhan ekonomi, β_0 adalah konstanta yang merepresentasikan nilai pertumbuhan ekonomi ketika semua variabel independen berada pada nol. Koefisien β_1 , β_2 , β_3 , dan β_4 masing-masing menunjukkan seberapa besar dampak dari variabel independent terhadap variabel dependen yang disebabkan oleh perubahan pada setiap variabel independent dengan asumsi variabel lain tetap. Sementara itu, ε adalah error term yang mencerminkan dampak dari faktor lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam analisis.

Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak stata 17, dilengkapi dengan uji asumsi klasik serta uji hipotesis untuk menjamin validitas model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024 dengan menggunakan regresi data panel. Untuk memastikan bahwa model yang digunakan sudah memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) dilakukan uji asumsi klasik.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk menganalisis apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel bebas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
ln(X1)	2.50	0.400448
ln(X2)	2.28	0.438129
ln(X3)	1.81	0.553447
ln(Z)	1.33	0.750544
Mean VIF	1.98	

Sumber: Hasil Olahan Stata 17, 2026

Berdasarkan hasil uji VIF diketahui bahwa seluruh variable memiliki nilai VIF dibawah 10. Mean VIF adalah $1,98 < 10$ sehingga model regresi dinyatakan terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah model regresi terdapat perbedaan varian dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

White's test

Ho: Homoskedasticity

Ha: Unrestricted heteroskedasticity

Chi2(14)	21.78
Prob > chi2	0.0833

Sumber: Hasil Olahan Stata 17, 2026

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji heteroskedastisitas didapat probabilitasnya $0,0833 < 0,05$ sehingga di dalam model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Tabel 5. Pemilihan Model Terbaik

Uji Panel	Probabilitas	Kesimpulan	
Chow Test	0.0012	Tolak H_0	FEM
Hausman Test	0.0000	Tolak H_0	FEM

Sumber: Hasil olahan data Eviews 12, 2025

Berdasarkan uji pemilihan model pada tabel 5. menunjukkan bahwa FEM lebih tepat digunakan dalam penelitian ini. Berikut disajikan hasil regresi estimasi *Fixed Effect Model*.

Tabel 6. Hasil Estimasi FEM

Fixed-effects (within) regression				
Group variabel: KAB/KOTA				
R-squared = 0.4151				
F (4.18) = 16.15				
Prob > F = 0.0000				
PDRB	Coefficient	Std. err	t	P > t
ln(X1)	2.80368	2.15469	1.30	0.196
ln(X2)	11.95053	1.615175	7.40	0.000
ln(X3)	2.331803	0.743722	3.14	0.002
ln(Z)	0.019444	0.127188	0.15	0.879
_cons	-92.14161	17.61676	-5.23	0.000
sigma_u	5.820476			
sigma_e	2.1432679			
rho	0.88059751			

Sumber: Hasil Olahan Stata 17, 2026

Berdasarkan tabel hasil estimasi dengan menggunakan stata 17, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = -92.14161 + (2.80368)X1 + (11.95053)X2 + (2.331803)X3 + (0.019444)Z \quad (2)$$

Hasil analisis menunjukkan belanja pegawai berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Sedangkan belanja barang dan jasa serta belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Dan investasi dalam negeri sebagai variabel kontrol berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Secara simultan, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 41,51%.

Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat

Berdasarkan hipotesis penelitian, ditemukan variabel belanja pegawai memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Barat dengan koefisien 2. 80368 dan probabilitas 0,196 > 0,05. Artinya belanja pegawai belum sepenuhnya berperan sebagai pengeluaran pemerintah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat disebabkan karena belanja pegawai lebih banyak digunakan membiayai gaji, tunjangan, dan kompensasi pegawai dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, manfaat belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung bersifat tidak langsung. Walaupun aparatur sipil negara memperoleh pendapatan, namun dampaknya terhadap perekonomian daerah bergantung pada bagaimana pendapatan tersebut dibelanjakan. Apabila sebagian pendapatan digunakan untuk ditabung atau dibelanjakan di daerah bukan tempat mereka bekerja, maka perputaran uang di dalam perekonomian Sumatera Barat menjadi terbatas. Akibatnya, multiplier effect dari peningkatan belanja pegawai belum cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hipotesis yang telah diajukan, dimana peningkatan belanja pegawai diduga ikut mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, sejalan dengan temuan Mawaddah et al., (2023) dan Rahmanda et al., (2025) yaitu belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesamaan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa belanja pegawai pada umumnya lebih berfungsi sebagai pengeluaran rutin pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan daripada sebagai instrument yang secara langsung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh Belanja Barang dan Jasa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan hasil belanja barang dan jasa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Dengan koefisien regresi 11,95053 dan probabilitas $0,000 < 0,05$. Artinya belanja barang dan jasa berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Signifikannya pengaruh belanja barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat karena sebagian anggaran digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi. Pengeluaran tersebut tidak hanya berupa pengadaan barang, tetapi juga pembayaran berbagai jasa, seperti jasa kebersihan, jasa konsultan, pemeliharaan gedung, jalan dan fasilitas publik lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan penyedia barang dan jasa di daerah, sehingga anggaran pemerintah menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha.

Selain memberikan pendapatan bagi penyedia barang dan jasa, kegiatan tersebut menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja dan penggunaan bahan baku. Salah satunya melalui kegiatan pemeliharaan gedung dan jalan yang membutuhkan material bangunan, peralatan dan tenaga kerja. Dengan demikian, manfaat belanja barang dan jasa tidak hanya dirasakan oleh pemerintah sebagai pengguna anggaran, tetapi juga oleh masyarakat dan pengusaha lokal yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Hasil penelitian ini dikukuhkan oleh studi yang dilakukan Mawaddah (2023), Rahmanda et al., (2025) yang menemukan belanja barang dan jasa berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesamaan hasil penelitian ini menandakan bahwa belanja barang dan jasa berperan strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi karena alokasi anggarannya secara langsung menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa, meningkatkan perputaran ekonomi, serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis pada penelitian ini ditemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Koefisien regresinya 2,331803 dan probabilitas $0,002 < 0,05$. Artinya, peningkatan belanja modal cenderung diiringi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Realisasi belanja modal dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan pengadaan aset tetap yang mendukung kegiatan ekonomi. melalui belanja modal, pemerintah daerah tidak hanya membangun jalan, jembatan dan irigasi tetapi juga pengadaan gedung, fasilitas publik, dan berbagai aset tetap lainnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut melibatkan tenaga kerja, pemasok bahan bangunan, serta penyedia jasa sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi daerah selama proses pelaksanaannya.

Selain memberikan dampak selama proses pembangunan, belanja modal juga menghasilkan manfaat ekonomi setelah aset tersebut dapat digunakan. Infrastruktur seperti jalan dan

jembatan yang memadai dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi barang jasa, mengurangi biaya transportasi dan perdagangan. Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang baik akan meningkatkan keterhubungan antar wilayah sehingga distribusi hasil pertanian, perdagangan, pariwisata, dan sektor sosial ekonomi lainnya dapat berlangsung lebih efisien. Efisiensi tersebut pada akhirnya meningkatkan produktivitas daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Temuan ini sejalan dengan teori pertumbuhan endogen yang dikemukakan Barro (1990), yang menjelaskan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan pada kegiatan produktif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun proporsi belanja modal kecil dibandingkan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dalam APBD, belanja modal tetap mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan efektivitas belanja pemerintah bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas dan produktivitas penggunaannya. Karena belanja modal memiliki kemampuan untuk menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang dan menghasilkan aset yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Istianto et al., 2021; Kirana & Susilo, (2024) yang menunjukkan hasil bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesamaan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan pengadaan fasilitas publik melalui belanja modal merupakan instrumen fiskal yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat

Berdasarkan pada hasil analisis, ditemukan investasi dalam negeri sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan pengaruh faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Sumatera Barat. Investasi dalam negeri memiliki nilai koefisien 0,019444 dengan nilai probabilitas 0,879 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa investasi dalam negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.

Tidak signifikannya pengaruh investasi dalam negeri menunjukkan bahwa peningkatan nilai investasi belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini terjadi karena kurangnya sumber daya yang cukup atau karena hibingan antar sector ekonomi belum berjalan dengan baik. Selain itu, realisasi investasi dalam negeri Sumatera Barat selama periode penelitian menunjukkan ketimpangan yang sangat jauh. Beberapa daerah dengan realisasi investasi yang tinggi dan daerah lainnya sangat rendah. Hal ini membuat realisasi investasi berfokus pada daerah-daerah tertentu sehingga tidak mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Investasi yang direalisasikan belum langsung memberikan tambahan output pada saat investasi dilakukan. Sebagian investasi masih digunakan untuk pembangunan tempat usaha, pengadaan mesin dan peralatan, maupun penambahan kapasitas produksi. Kegiatan tersebut membutuhkan waktu sebelum menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu terlihat di tahun yang sama dengan tahun realisasinya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Berlian Manan & Suriadi, (2026) menemukan bahwa investasi dalam negeri berpengaruh positif dan tidak signifikan

terhadap PDRB. Kesamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan peningkatan nilai investasi belum secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan belanja barang dan jasa dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama 2019-2024. Temuan ini mendukung pandangan teori pertumbuhan endogen Robert J. Barro (1990), yang menyatakan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan pada kegiatan produktif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pengalokasian anggaran pada kegiatan yang mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

Temuan tersebut menunjukkan komponen belanja daerah yang bersifat produktif berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan belanja pegawai. Oleh karena itu pemerintah perlu mengoptimalkan kualitas dan efektivitas alokasi belanja barang dan jasa dan belanja modal agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.

Pemerintah daerah Sumatera Barat disarankan untuk mengoptimalkan alokasi belanja daerah pada komponen belanja barang jasa dan belanja modal. Pengalokasian anggaran tersebut perlu diarahkan pada program dan kegiatan yang produktif, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas pelayanan publik.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperpanjang periode penelitian, menambahkan variabel lain seperti pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia sehingga memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

- Arniati. (2022). *Ekonomi Regional*. Widina Bhakti Persada, 1–175.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN, 1–252.
- Berlian Manan, A., & Suriadi, I. (2026). Pengaruh PMDN, PMA dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 6(3), 359–367. <https://doi.org/10.47065/jtear.v6i3.2589>
- Cesarina Maulid, L., Rangga Bawono, I., & Aryo Sudibyo, Y. (2021). *The Effect of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia*, 16(1). <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ekuilibrium>
- Fajriar, A., & Khoirunurrofik, K. (2025). The Effect of Local Government Spending Behavior on Local Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(2), 56–72. <https://doi.org/10.17977/um002v17i22025p056>
- Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019). The impact of fiscal decentralization on economic growth in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 11(2), 152–160. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol11.iss2.art3>
- Istianto, T., Kumenaung, A. G., & Ch P Lapian, A. L. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Di Bolaang Mongondow Raya. In *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3). <https://doi.org/10.46576/bn.v8i1.6296>

- Kirana, G., & Susilo. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Penyertaan Modal, dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(4), 1115–1125.
<https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.4.11>
- Mankiw, G. (2016). *Macroeconomics*. Worth Publisher, 1–679.
- Mawaddah, N. (2023) *Jurnal Sistem Infoemasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 185–198.
<https://doi.org/10.54951/sintama.v3i3.669>
- Puspita, D., Raharja, M., Hadi, S., Latief Baroto, A., Permana, A. W., & Rahayu, W. T. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Editor*.
- Rahmanda, R., Andini, R., Sitepu, C., Malau, V., & Banjarnahor, A. (2025). Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2413–2423.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3586>
- Ramadhan, M., Aji, B., Wijayanti, D. (2023). *Analisis Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*.
- Santika, A. R., & Qibthiyyah, R. M. (2020). Government Size dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 20(2), 212–230.
<https://doi.org/10.21002/jepi.2020.13>
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Modern*. PT Raja Grafindo Persada, 1–549.
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. In *Indonesian Treasury Review*, 2(1).